

BAB I PENDAHULUAN

Pada Pendahuluan ini diuraikan gambaran umum mengenai topik penelitian yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

I.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah pesisir sebesar 81.000 km yang mana menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pesisir terpanjang setelah Kanada. Hal tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi Indonesia, namun juga memunculkan persoalan baru yang cukup mengkhawatirkan. Desa di wilayah pesisir menjadi salah satu wilayah yang sering kali menjadi kawasan rawan terhadap bencana alam. Banjir air pasang menjadi salah satu contoh bencana yang kerap terjadi di wilayah pesisir akibat kenaikan muka air laut secara global (Asrofi dkk., 2017). Perubahan iklim yang terus terjadi secara nyata telah memberikan dampak yang signifikan dan berpotensi permanen. Salah satu dampak nyata dari perubahan iklim adalah meningkatnya permukaan air laut. Kenaikan ini menyebabkan penyusutan luas daratan dan mundurnya garis pantai. Akibatnya, saat pasang air laut, air dapat merendam pemukiman serta penggunaan lahan lainnya, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat kawasan pesisir (Wacano dkk., 2013).

Dalam berbagai kasus, ditemukan fakta bahwa kebencanaan di desa pesisir sering kali diperburuk oleh minimnya kesiapan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Banyak desa di wilayah pesisir Indonesia yang memiliki infrastruktur yang belum memadai untuk menangani ancaman bencana, baik itu dari segi sistem peringatan dini, jalur evakuasi, maupun fasilitas penanggulangan bencana yang terorganisir dengan baik (Fallahiyah dkk., 2023). Selain itu, sebagian besar masyarakat desa pesisir masih bergantung pada pola hidup tradisional dan sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti pertanian, perikanan, dan pemukiman yang terletak dekat dengan garis pantai. Ketergantungan ini membuat mereka sangat rentan terhadap bencana, baik itu banjir, abrasi pantai, maupun gelombang pasang yang semakin intensif.

Dampak dari bencana yang sering terjadi di desa pesisir tidak hanya dirasakan

dalam bentuk kerusakan fisik, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam banyak kasus, bencana wilayah pesisir meliputi banjir pasang, abrasi pantai, dan gelombang tinggi dapat merusak pemukiman penduduk, fasilitas umum, serta sarana dan prasarana vital lainnya sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai macam sektor seperti perikanan maupun pertanian juga menjadi sektor utama yang dapat terpengaruh secara langsung. Sektor perikanan, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat pesisir, juga terdampak parah. Perubahan ekosistem laut dan kerusakan terumbu karang akibat kenaikan suhu air laut serta pengaruh abrasi mengurangi hasil tangkapan ikan, yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat (Winarna dkk., 2020). Selain itu, bencana alam di pesisir juga menyebabkan kerugian besar dalam sektor pertanian, terutama pada lahan pertanian yang terendam air laut atau tergerus oleh abrasi pantai. Penyusutan lahan dan hilangnya kesuburan tanah mengurangi produksi pangan, yang berujung pada ketahanan pangan yang semakin menurun (Winarna dkk., 2020).

Pentingnya ketangguhan bencana di desa pesisir semakin mendesak mengingat intensitas dan frekuensi bencana alam yang terus meningkat akibat perubahan iklim. Ketangguhan bencana tidak hanya soal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana itu sendiri, tetapi juga kemampuan suatu komunitas untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi setelah bencana terjadi (Yugyasmono dkk., 2023). Di desa pesisir, ketangguhan ini menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan hidup masyarakat serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Tanpa ketangguhan yang baik, bencana dapat merusak tatanan sosial yang ada, menyebabkan penurunan kualitas hidup yang signifikan, serta memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di antara masyarakat yang rentan.

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk di pedesaan, untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mengurangi persepsi ketertinggalan (Andini dkk., 2025). Tugas pemerintah desa yang sangat penting tersebut tentu sangat memerlukan peran teknologi informasi untuk memfasilitasi, mengefesienkan, dan mengotomatisasi interaksi antara pemerintah dengan warga (Irawan dkk., 2023). Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam membangun ketangguhan desa pesisir adalah dengan memanfaatkan teknologi yang

ada. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini, pengelolaan risiko bencana, serta pemulihan pasca-bencana (Kopa dkk., 2017). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), data terkait kondisi cuaca, pasang surut air laut, serta potensi bencana lainnya dapat dianalisis dan disebarkan secara *real-time* kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Teknologi juga memungkinkan integrasi antara berbagai sistem dan pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga lembaga non-pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era industri 4.0 saat ini menjadikan desa secara kontinu melakukan adaptasi melalui penerapan teknologi, termasuk pada lembaga pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik. Lembaga statistik turut berkontribusi terkait pengadaan data dan informasi yang harus dikelola dengan baik di seluruh area operasi organisasi sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang efektif. Kebutuhan akan keselarasan informasi dengan dibentuk tata kelola teknologi informasi menjadi landasan dalam menerapkan arsitektur (Armi dkk., 2024). Perencanaan dalam menjalankan pemerintahan desa perlu penyegaran agar dapat berjalan dengan baik, dengan masuknya teknologi sudah seharusnya pemerintah menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin (Angeline & Fibriani, 2021).

Transformasi digital pada tingkat desa diidentifikasi masih terdapat beberapa permasalahan berupa ketidakjelasan dalam arah strategis dan panduan implementasi teknologi di desa. Ini menciptakan hambatan dalam tata kelola infrastruktur, pengelolaan data, dan penyelenggaraan layanan publik yang efisien (Supriadi dkk., 2024). Penerapan teknologi informasi di desa harus memperhatikan syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal nomor 23 tahun 2017, yakni sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan mampu menjawab permasalahan yang terjadi masyarakat, ramah lingkungan, bermanfaat sehingga digunakan oleh masyarakat dengan mudah dan meningkatkan nilai tambah ekonomi serta lingkungan (Marjuki & Cahyana, 2022).

Salah satu bentuk konkret pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa adalah melalui Sistem Informasi Desa (SID). SID merupakan platform yang dirancang untuk mengintegrasikan data dan informasi penting terkait potensi desa, demografi, hingga risiko bencana. Implementasi SID memiliki peran strategis dalam mendukung penanggulangan bencana berbasis komunitas, terutama melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi ancaman bencana, dengan fokus pada mitigasi risiko dan peningkatan kapasitas lokal. Dengan terbentuknya Destana, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan Pilar ke-3 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pilar pembangunan lingkungan (Ratnasari & Wildawati, 2022).

Dalam pengembangan konsep Desa Tangguh Bencana (Destana), penelitian ini berfokus pada salah satu desa pesisir yang berpotensi rawan bencana, yaitu Desa Eretan Wetan. Desa ini terletak di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Wilayah pesisir Kecamatan Kandanghaur menunjukkan risiko tinggi terhadap gelombang ekstrim dan abrasi, terbukti dengan kejadian abrasi pantai di Desa Eretan dan gelombang ekstrim di tahun 2020 dan 2021. Dampaknya meliputi kerusakan infrastruktur pantai dan hilangnya garis pantai, mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir (Perbup KRB BPBD Kab.Indramayu, 2024). Penduduk di Desa Eretan Wetan juga sering berhadapan dengan banjir rob yang mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas rumah tangga, akses jalan, serta penggunaan fasilitas umum. Banjir rob ini tidak hanya merusak infrastruktur pantai akibat abrasi, tetapi juga menyebabkan penduduk kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Salah satu dampak yang signifikan dari banjir rob adalah perubahan penggunaan lahan produktif, yang menjadi semakin berkurang atau bahkan hilang akibat terendam air laut. Banyak petani tambak yang harus beralih menjadi pekerja industri karena lahan tambaknya tenggelam. Dampak banjir rob berbeda pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penangkapan ikan di laut lepas dibanding dengan petani tambak, yang kehidupannya sangat bergantung pada lahan perikanan yang mudah terpengaruh oleh perubahan iklim (Asyiwati dkk., 2023).

Perubahan iklim juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mitigasi risiko bencana di tingkat desa. Terdapat empat indikator utama perubahan iklim yang meliputi: pertama, peningkatan suhu secara global; kedua, kenaikan tinggi permukaan air laut; ketiga, peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem; dan keempat, perubahan pola curah hujan (Perbup KRB BPBD Kab.Indramayu, 2024). Data terkini menunjukkan bahwa perubahan iklim berkontribusi signifikan terhadap peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan. Sebagai contoh, penurunan cadangan air bisa menyebabkan kekeringan pada satu periode, sementara kelebihan debit air pada periode lain memperburuk kondisi ekosistem dan meningkatkan risiko bencana di daerah rawan seperti Desa Eretan Wetan. Fenomena ini memperburuk risiko abrasi dan banjir rob yang sudah mengancam wilayah pesisir desa tersebut.

Upaya menjaga ekosistem untuk mengurangi abrasi pantai sejalan dengan konsep keberlanjutan dan mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri merupakan kesepakatan global yang menyusun agenda pembangunan berkelanjutan. Konsep ini juga berperan membantu pemerintah pusat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya SDGs. SDGs mencakup 18 agenda global yang perlu menjadi perhatian masyarakat, diantaranya terdapat 3 (tiga) poin yang relevan dengan ekosistem pesisir, yaitu agenda 13 (perubahan iklim), agenda 14 (kehidupan bawah air), dan agenda 15 (kehidupan di atas tanah) (Noor dkk., 2021).

Tabel I-1. Skor SDGs Desa Eretan Wetan (SID Kemendesa PDTT, 2024)

No.	Goals SDGs	Score
1.	Desa Tanpa Kemiskinan	27,36
2.	Desa Tanpa Kelaparan	33,33
3.	Desa Sehat dan Sejahtera	61,76
4.	Pendidikan Desa Berkualitas	27,99
5.	Keterlibatan Perempuan Desa	66,67
6.	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	61,58
7.	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	100,00
8.	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	28,87
9.	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	13,04
10.	Desa Tanpa Kesenjangan	44,20
11.	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	44,91
12.	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	5,88
13.	Desa Tanggap Perubahan Iklim	5,88
14.	Desa Peduli Lingkungan Laut	0,00

No.	Goals SDGs	Score
15.	Desa Peduli Lingkungan Darat	29,41
16.	Desa Damai Berkeadilan	87,50
17.	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	0,00
18.	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	10,71

Berdasarkan Tabel I-1, skor SDGs Desa Eretan Wetan untuk tujuan 13, yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim, masih sangat rendah dengan angka 5,88. Tantangan yang dihadapi dalam mitigasi perubahan iklim di desa ini mencakup kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya adaptasi dan mitigasi risiko bencana terkait perubahan iklim. Komitmen ini juga tercermin dalam agenda SDGs, yang menempatkan aksi iklim sebagai salah satu prioritas global. Indonesia turut serta dalam aksi ke-13, *Climate Action*, yang menggarisbawahi urgensi untuk "*take urgent action to combat climate change and its impacts*" (Puteri dkk., 2005).

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana, Desa Tangguh Bencana (Destana) dikembangkan sebagai langkah strategis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Landasan hukum pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Namun, meskipun telah berjalan hampir satu dekade, belum semua desa rawan bencana mampu bertransformasi menjadi Destana (Ratnasari & Wildawati, 2022). Di tengah ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, penguatan kapasitas di tingkat daerah menjadi semakin penting. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kapasitas tersebut adalah Indeks Kapasitas Daerah (IKD), yang mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, kelembagaan, pengkajian risiko, kesiapan logistik, hingga sistem pemulihan pasca-bencana. IKD memberikan gambaran objektif tentang kesiapan suatu daerah, sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi kebencanaan yang adaptif dan responsif. Dengan demikian, hasil pengukuran IKD diharapkan dapat membantu pemerintah daerah merancang program mitigasi dan adaptasi bencana yang lebih efektif untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh. Tabel I-2 berikut menyajikan hasil pengukuran IKD Kabupaten Indramayu berdasarkan tujuh prioritas ketahanan daerah yang dinilai melalui kontribusi data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel I-2. Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Indramayu
(Perbup KRB BPBD Kab.Indramayu, 2024)

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,81	0,64	Sedang
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,43		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,87		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,62		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,64		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,55		

Tabel I-2 di atas menunjukkan bahwa indeks ketahanan daerah di Kabupaten Indramayu, diperoleh melalui pengisian data oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam matriks perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD), menghasilkan nilai 0,64. Nilai ini berada dalam kategori sedang, menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ketahanan desa. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan untuk memperkuat kapasitas dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi risiko bencana yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa desa juga perlu melakukan pembaharuan tata kelola dan mengadopsi teknologi informasi seiring berkembangnya digitalisasi (Ananda dkk., 2021).

Berdasarkan analisis situasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk membangun ketangguhan desa pesisir di Desa Eretan Wetan harus didukung dengan penerapan program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program SDGs Desa menjadi prioritas dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan didukung oleh Dana Desa. Oleh karena itu, program ini menjadi prioritas dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Meskipun konsep Desa Tangguh Bencana (Destana) telah diperkenalkan lebih dari satu dekade, banyak desa pesisir di Indonesia yang belum menerapkan sistem manajemen bencana yang terstruktur dan berbasis teknologi. Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada aspek kesiapsiagaan masyarakat dan penguatan infrastruktur, dengan eksplorasi yang masih terbatas terhadap integrasi digital dan perencanaan arsitektur. Masih terdapat keterbatasan penelitian yang memanfaatkan *framework enterprise architecture*, seperti TOGAF 10, untuk menyelaraskan strategi penanggulangan bencana di tingkat desa dengan sistem informasi dan infrastruktur teknologi secara sistematis.

Untuk mendukung implementasi program ini, diperlukan penyelarasan teknologi informasi dan tujuan organisasi, salah satunya melalui perancangan *enterprise architecture*. *Enterprise architecture* merupakan solusi strategis dengan pendekatan hierarkis untuk menyelaraskan fungsi IT dan bisnis melalui integrasi sistem informasi, proses, unit organisasi, serta berbagai pihak terkait dalam sebuah organisasi. *Enterprise architecture* menyediakan praktik terbaik, pedoman, alat, proses, dan pola untuk membantu pembuatan arsitektur enterprise dengan berbagai tujuan (Irawan dkk., 2023). Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko bencana di tingkat desa.

Perancangan *enterprise architecture* dalam penelitian ini menggunakan *framework* TOGAF 10 karena bersifat *open source* dan fleksibel, sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk menyelaraskan antara proses bisnis dengan teknologi informasi yang dimiliki. TOGAF 10 mencakup beberapa fase, yaitu *preliminary, architecture vision, business architecture, information system architecture, technology architecture, opportunities and solution*, serta *migration planning*. Maka dari itu, perencanaan arsitektur sistem informasi dengan menggunakan TOGAF 10 menghasilkan implementasi yang terstruktur serta memiliki target waktu yang telah ditentukan pada setiap tahap pengembangannya (Nugraha & Saefudin, 2022). Dalam penelitian ini, penerapan TOGAF 10 menghasilkan *blueprint enterprise architecture* dan *IT roadmap* sebagai panduan strategis bagi Pemerintah Desa Eretan Wetan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efisien, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana rancangan rancangan *blueprint enterprise architecture* menggunakan *framework* TOGAF 10 pada konsep Desa Tangguh Bencana di daerah pesisir, khususnya di Desa Eretan Wetan?
- b. Bagaimana rancangan *IT roadmap* untuk pengimplementasian konsep Desa Tangguh Bencana dalam meningkatkan ketahanan bencana di Desa Eretan Wetan?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menghasilkan rancangan *blueprint enterprise architecture* dengan menggunakan *framework* TOGAF 10 untuk mendukung implementasi konsep Desa Tangguh Bencana di wilayah pesisir, khususnya di Desa Eretan Wetan.
- b. Menghasilkan rancangan *IT roadmap* sebagai pedoman keberhasilan implementasi konsep Desa Tangguh Bencana untuk meningkatkan ketahanan bencana di Desa Eretan Wetan.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perancangan *blueprint enterprise architecture* dalam implementasi Desa Tangguh Bencana menggunakan *framework* TOGAF 10 yang akan dibatasi pada 7 fase, yaitu *preliminary phase, architecture vision, business architecture, information system architecture, technology architecture, opportunities and solutions, dan migration planning*.
- b. Perancangan *IT roadmap* untuk pedoman implementasi konsep Desa Tangguh Bencana akan difokuskan pada SDGs Desa untuk tujuan 13, yaitu Desa Tangguh Perubahan Iklim.

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, di antaranya:

1. Bagi pemerintah, termasuk BNPB, BPBD Kabupaten Indramayu, dan Pemerintah Desa Eretan Wetan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perancangan dan implementasi Desa Tangguh Bencana guna mendukung pencapaian SDGs goals 13 (Desa Tangguh Perubahan Iklim), serta dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan program penanggulangan bencana yang lebih efektif dan terintegrasi.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dalam merancang *enterprise architecture* pada daerah desa pesisir, serta memperkaya literatur mengenai penerapan TOGAF dalam penanggulangan bencana.
3. Bagi pihak Universitas Telkom, penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama dengan Pemerintah Desa Eretan Wetan dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan perancangan *enterprise architecture* kedepannya.
4. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu dan wawasan dalam perancangan implementasi *enterprise architecture* mengenai strategi penanggulangan bencana di daerah pesisir.

I.6 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini disusun secara runtut untuk memudahkan pemahaman, dengan sistematika penulisan isi dan pembahasan setiap bab, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan dan saran. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang memuat berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang digunakan sebagai landasan untuk memahami permasalahan, mendukung proses analisis, serta merumuskan solusi dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang meliputi model konseptual, sistematika penyelesaian masalah, pengumpulan dan pengolahan data, metode evaluasi, serta alasan pemilihan metode yang digunakan.

BAB IV Objek Penelitian

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian yang bertujuan memberikan gambaran umum mengenai latar belakang, kondisi eksisting, serta permasalahan yang dihadapi. Uraian dalam bab ini menjadi landasan dalam memahami konteks permasalahan yang ada dan sebagai acuan dalam perumusan serta perancangan solusi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Bab V Analisis dan Perancangan

Pada bab ini berisi tahapan dalam perancangan *enterprise architecture targeting*, termasuk tahapan yang ada dalam fase TOGAF 10 mencakup fase *preliminary, architecture vision, business architecture, information system architecture, technology architecture, opportunities and solution*, serta *migration planning*.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi uraian kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian serta saran yang disusun berdasarkan hasil analisis dan perancangan solusi yang telah dilakukan.